

Perwari dalam Kemelut Revolusi Indonesia: Gejolak di Awal Gerak

Galuh Ambar Sasi

Universitas Kristen Satya Wacana
Email : ardhanawari@gmail.com

Abstract

Women's movement during the Indonesian revolution focused on women mobilization in the Red Cross, paramilitary, liaisons, soup kitchens, organizational changes, and congresses. Reviewing Harry E. Poeze's writings regarding the relationship between the Persatuan Perjuangan and Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), this paper argues that the independence proclamation of Indonesia gave a new identity and transformation. These two processes gave birth to different imaginations and interpretations of Indonesianness, independence, the Indonesian revolution, and the position of women in the process. On the other hand, the difference in the imagination and meaning destroys Perwari and affects her movement patterns afterward. Finally, the experience of Perwari may be offering material discussion about an alternative discourse on the periodization of the Indonesian women's movement.

Keyword: *Indonesian Revolutionary, Women Movement, Perwari, Women State*

Pendahuluan

Kajian perempuan relatif jarang menjadi narasi dan interpretasi utama historiografi Indonesia (Dobbin, 1979: 44-51; Kuntowijoyo, 2005: 114-115; Purwanto, 2006: 29-31; Sasi, 2017; Taylor, 1995: 13). Realitas ini bisa dilacak dari kehadiran maupun ketidakhadiran perempuan dalam peristiwa-peristiwa besar Indonesia sebagai subjek otonom. Padahal, ada banyak tema yang bisa ditulis di antaranya seperti eksistensi perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, keagamaan, bahkan kuliner maupun biografi atau prosopografi perempuan, gerakan perempuan, gambaran perempuan, hubungan laki-laki dan perempuan, kelompok-kelompok perempuan, etnisitas, terbitan perempuan, perang, diplomasi, maupun pembentukan negara (Fatimah, 2008: 377,390 ; Kuntowijoyo, *Ibid.*: 125-127; Purwanto, *Ibid.*: 30-34.)

Realitas lain menunjukkan bahwa gerakan perempuan merupakan tema dominan dalam historiografi perempuan Indonesia. Kuntowijoyo menyebut bahwa sejarah perempuan Indonesia kerap kali diartikan sebagai sejarah gerakan perempuannya (Kuntowijoyo, *Ibid.*:122). Hal itu terjadi karena adanya anggapan bahwa gerakan perempuan adalah wujud terkonkret narasi dan perjuangan perempuan untuk keluar dari domestifikasi sosial menuju eksistensi di ranah publik (Triwibowo, 2006: 28). Selain itu, gerakan perempuan memiliki visi dan misi yang tidak pernah berubah corak, menyesuaikan waktu, dan tempat (Suryochondro, 1984: 67). Sementara itu, organisasi perempuan adalah satu fokus utama dalam pembahasan gerakan perempuan. Mengutip Blackburn, organisasi perempuan adalah jantung gerakan perempuan. Hal ini terjadi karena organisasi menyampaikan keprihatinan perempuan secara berkesinambungan dan terorganisasi, berbicara langsung kepada pihak-pihak terkait atas nama perempuan dan menjadi mitra konsultasi untuk perempuan (Blacburn, 2009: 21-23).

Persoalannya, narasi gerakan perempuan Indonesia relatif terjebak pada deskripsi kegiatan kongres organisasi perempuan dan hasil-hasilnya. Di lain sisi, deskripsi itu tanpa disertai dengan analisis makna apalagi semangat zaman yang menggerakkan juga pengaruh suatu peristiwa aspek tertentu dalam suatu periode terhadap perubahan arah dan dinamika gerak mereka. Persoalan itu terutama tampak pada gerakan perempuan Indonesia masa revolusi. Dalam kronologi yang disusun oleh Departemen Penerangan, misalnya, gerakan perempuan periode ini dijabarkan dalam beberapa aktivitas. *Pertama*, aktivitas terorganisasi perempuan sebagai perawat, kurir, serta penyelenggara dapur umum dan klinik mobil. *Kedua*, kelahiran Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) dan Kowani (Kongres Wanita Indonesia). *Ketiga*, rapat-rapat Kowani 14-16 Juni 1945, 14-16 Juni 1947, dan 26-28 Agustus 1948. *Keempat*, rapat Permusjawaratan Wanita Indonesia serta kongres Kowani di Jakarta 24-25 November 1950 (Department of Information Republic of Indonesia, 1968: 12-16).

Hal yang tidak jauh berbeda juga terdapat dalam tulisan-tulisan lainnya. Stuers dalam ulasannya tentang gerakan perempuan periode Republik Indonesia menulis bahwa kemerdekaan Republik Indonesia mendorong perempuan untuk aktif dan membangun negara yang baru merdeka. Hal ini ditunjukkan dengan rangkaian kongres (Stuers, 2008: 175-193). Aktivitas kongres sebagai representasi gerakan perempuan ini juga dinarasikan oleh Soewondo dan Soerasno dengan narasi relatif singkat dibandingkan dengan periode lainnya (Soewondo dan Surasno, 1995: 136-140). Suryochondro melengkapi narasi kongres itu dengan kronik organisasi perempuan.¹ Sementara itu, Kowani menjelaskan gerakan perempuan periode revolusi relatif sedikit bervariasi. Tidak hanya berfokus pada kongres, gerakan perempuan selama empat tahun revolusi dalam buku terbitan Kowani juga direpresentasikan melalui aktivitas kelaskaran perempuan, kegiatan dapur umum, serta Palang Merah atau klinik mobil (Kongres Wanita Indonesia, 1978: 67-85). Ketiga aktivitas ini menjadi narasi utama perempuan sepanjang periode revolusi (Astuti, 2006: 75-79; Darwin, 2004: 286; Doran, 1987: 105; Ohorella, Sutjaningsih dan Ibrahim, 1992: 58-83; Muryantoro, 2006: 61-68; Sasi, *op.cit.*: 17; Soewito, 1992; Suhatno, 2006: 67-74; Sukarno, 1984: 190; Winarni, Sulistyono dan Nurwanti, 2013; Wieringa, 1998: 14).

Dengan kata lain, narasi gerakan perempuan periode revolusi relatif hanya berkaitan dengan pembubaran organisasi perempuan bentukan Jepang, pembentukan organisasi baru, serta mobilisasi perempuan baik di front depan dan belakang melalui kegiatan kelaskaran, Palang

¹ Ada dua belas organisasi baru yang lahir di masa ini. Kedua belas organisasi itu adalah Perwari (1945), Wanita Negara Indonesia Jakarta (1945), Gerakan Puteri Indonesia Tanjungkarang (27 Oktober 1945), Persatuan Pegawai Puteri Indonesia (1945), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (2 Oktober 1945), Muslimat Masyumi (1945), Persatuan Wanita Republik Indonesia (17 Desember 1945), Pemuda Putri Indonesia Yogyakarta (17 Desember 1945), Jalasenastri (1946), Barisan Buruh Wanita Klaten (1946), Perempuan Budi Istri Bandung (19 Desember 1947), Persatuan Istri Polisi Bhayangkari Yogyakarta (17 Agustus 1949). Lihat Soeryochondro. *op. cit.* hlm. 213-214.

Merah, dapur umum, serta pengumpulan dana perang. Sementara itu, narasi tentang kongres sebagai roh dan ekspresi gerakan juga bisa dipastikan senantiasa berkaitan dengan pelaksanaan dan butir-butir hasil kongres-kongres di lima kota berbeda.²

Selain keterbatasan sumber penulisan³, narasi seperti itu kiranya juga terjadi karena generalisasi revolusi sebagai periode tunggal tanpa pernah memperhitungkan dinamika yang terjadi dalam empat tahun krusial tersebut. Di lain sisi, kritik dan perspektif baru penulisan sejarah perempuan periode revolusi Indonesia sebenarnya tidak kurang. Purwanto menulis jika historiografi Indonesia lebih terpaku pada perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan daripada proses sosialisasi keluarga atau kehidupan sosial perempuan pada masa revolusi (Purwanto, *op.cit*: 43).

Poeze juga telah memberikan perspektif berbeda tentang gerakan perempuan periode itu. Melalui kalimat-kalimat singkat dalam enam halaman, ia mengajak pembaca memahami bagaimana persepsi revolusi dan ideologi mengubah gerakan sekaligus memecah organisasi perempuan (Poeze, 2009) Namun, ia melihat dan menempatkan organisasi perempuan, dalam hal ini Perwari, dari kacamata sejarah Persatoean Perdjoengan. Dengan demikian, tidak ada informasi jelas apa itu Perwari, alasan berafiliasi dengan Persatoean Perdjoengan, dan gejala di antara anggota-anggotanya.

Di balik kekurangan menjelaskan organisasi perempuan di awal revolusi, Poeze secara tidak langsung telah mengungkapkan sebuah periode pendek yang dialami oleh gerakan perempuan di Indonesia. Di lain sisi, ulasannya juga memberikan alternatif narasi tentang Perwari yang umumnya hanya berkaitan dengan tiga hal. *Pertama*, pembentukannya pada 17 Desember 1945 bersamaan dengan Kongres Perempuan di Klaten. *Kedua*, perjuangan Undang-undang Perkawinan, protes poligami Sukarno. *Ketiga*, kemunduran dan pembersihan besar-besaran Perwari pascaperistiwa September 1965 (Fatmawati, 2019; kongres wanita Indonesia, *op.cit*: 334; Magdalena, 2009; Nugroho, 2008; Rambe, 1983: 235; Rohmah, 2015; Rospirawati, 2013; Sasi, 2010; Utami, 2002).

Berpijak dari uraian-uraian di atas, tulisan ini mencoba untuk meninjau ulang tulisan Poeze tentang gejala organisasi perempuan Perwari di awal revolusi. Tinjauan dilakukan dengan menyajikan fragmen yang hilang dalam sejarah Perwari dengan fokus membahas dinamika lima bulan pertamanya. Surat kabar, majalah, serta memoar menjadi referensi utama untuk menjawab pertanyaan dua pertanyaan. *Pertama*, apa makna proklamasi kemerdekaan bagi aktivis perempuan? *Kedua*, apakah koalisi Perwari dalam Persatoean Perdjoengan adalah contoh bentuk penyimpangan orientasi (gerakan) perempuan terhadap revolusi Indonesia?

Wadah Perempuan Baru

Berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia mendorong para perempuan untuk bertransformasi dan mengekspresikan diri sebagai manusia baru Indonesia. Berbagai cara dilakukan. Dari mulai pawai kemerdekaan, memasang simbol-simbol keindonesiaan, sampai keluar masuk desa-desa untuk memperkenalkan negara dan semua atribut keindonesia (Sasi, 2015). Selain itu, mereka juga membentuk organisasi-organisasi baru menggantikan Fujinkai bentukan rezim Jepang.

Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) adalah salah satunya. Organisasi ini dibentuk oleh Ny. Soenarjo Mangoenpoespito, mantan ketua Fujinkai. Sementara anggotanya adalah semua organisasi perempuan lokal dengan tugas pokok mempertahankan kemerdekaan. Contohnya,

² Klaten (15-17 Desember 1945), Solo (25-26 Februari 1946 dan 26-28 Agustus 1948), Madiun (14-16 Juni 1946), Magelang (14-16 Juli 1947), serta Yogyakarta (26 Agustus-2 September 1949).

³ Hal ini sebagaimana juga diungkapkan Harry A. Poeze dalam sebuah perbincangan informal di kantor Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 4 November 2019.

membantu Palang Merah, menyelenggarakan dapur umum, serta menyantuni prajurit di garis depan (Soedijat, 1995: 284).

Bersamaan dengan pembentukan Perwani, di Jakarta dibentuk Wanita Negara Indonesia (Wani). Organisasi ini dipimpin oleh perempuan-perempuan teras dalam gerakan perempuan seperti Soewarni Pringgodigdo, Sri Mangoensarkoro, Soejatin Kartowijono, dan Soesilowati. Adapun tujuannya ialah menyelenggarakan dapur umum, mendistribusikan beras untuk perjuangan, serta menyusun tenaga perempuan untuk kemerdekaan Indonesia secara cepat dan seluas-luasnya. Sri Mangoensarkoro dalam *Pergerakan Wanita Indonesia* mendeskripsikan bahwa usaha itu mencakup dua hal. *Pertama*, terlibat dalam usaha perjuangan atau pertempuran untuk mempertahankan kekuasaan Indonesia Merdeka yang telah direbut dari Jepang. *Kedua*, memasukkan tokoh-tokoh perempuan untuk duduk dalam Komite Nasional Pusat, atau badan perwakilan rakyat (Mangoensarkoro, 1946: 18).

Untuk menyatukan semua organisasi itu serta menegaskan posisi perempuan dalam negara yang baru, Perwani Yogyakarta mengusulkan perlunya sebuah kongres di Yogyakarta. Kongres ini sekaligus untuk merealisasikan rencana Kongres Perempuan Indonesia V yang batal diselenggarakan di Semarang karena Perang Dunia II. Perwani daerah di seluruh Indonesia, Wani Jakarta dan sekitarnya, Badan Pusat Tamansiswa, Pimpinan Pusat Aisijah, serta Perhimpunan Poetri Indonesia adalah organisasi-organisasi yang dirangkul untuk berkongres. Adapun Gedung Seni Sono, Yogyakarta, direncanakan menjadi tempat perhelatan. Rencana itu kandas. Satu bulan sebelum acara, 25 dan 27 November 1945, Yogyakarta dibom Inggris (*Kedaulatan Rakjat*, 28-11-1945). Pengeboman kedua terjadi pukul 13.00, tepat tiga jam sebelum Perwani melangsungkan rapat persiapan. Keesokan harinya, Hamengku Buwono IX melarang semua aktivitas kongres, konferensi, dan semacamnya (Soewito, 2005) di kota yang kala itu populer sebagai Kota Kongres (Anwar, 2015: 119). Sehubungan dengan hal itu, panitia disarankan untuk mengalihkan ajang kongres ke tempat lain. Klaten pun dipilih dengan pertimbangan tidak jauh dari Yogyakarta dan relatif aman. Pemilihan Klaten sebagai tempat perhelatan kongres ditindaklanjuti dengan pengiriman utusan ke sana. Suratmi dan D.M. Hadiprabowo adalah sosok-sosok yang berada di balik usaha keras tersebut. Dengan senang hati Bapak Bupati Klaten menerimanya serta menyediakan Gedung Kabupaten sebagai acara kongres. Lain daripada itu, Gusti Joedonegoro menjadi panitia pembantu (Soedijat, *op.cit*: 285).

Pengeboman Yogyakarta juga membuat banyak perempuan ketakutan dan membatalkan keikutsertaannya dalam kongres. Bahkan, panitia kerja pun hanya tersisa lima orang, yaitu Ny. Soesanto (ketua), S. Iman Soedijat (penulis I), anak-beranak Sri Soedari Imam Panudja (penulis II) dan Din Soerjadingrat (bendahara I), serta Ny. Soekardi (bendahara II). Dengan keberanian, kelima orang ini nyaris setiap hari pulang pergi Yogyakarta—Klaten dengan fasilitas mobil, bensin, dan sopir dari Hamengku Buwono IX (Soewito, *op.cit*: 356). Pembakaran, pertempuran, dentuman senjata api, serta gelegar mortir dan meriam menjadi pengalaman rutin mereka (Soedijat, *op.cit*: 286).

Setelah susah payah itu, kongres pertama Perwari bisa digelar 15-17 Desember 1945. Di setiap tempat pada setiap stasiun orang-orang berkumpul menyambut para perempuan ini. Dari setiap perempatan, mereka meneriakkan pekik merdeka (Stuers, *op.cit* : 196). Antusias terhadap kegiatan Perwari juga ditunjukkan Bupati Joedonegoro dengan menanggung seluruh akomodasi seluruh peserta. Ia memberikan rumah besar berikut paviliunnya untuk menginap. Soedijat mengenang bahwa para perempuan itu terpaksa membuang undi untuk menentukan lokasi menginap (Soewito, *op.cit*: 358).

Penjagaan ketat, pengeledahan, dan penyitaan juga menjadi bagian cerita kongres Perwari. Hal itu terutama dialami oleh perempuan-perempuan yang berada dari luar Klaten maupun Yogyakarta (Kartowijono, 1984: 12-13). Sisanya, mereka kebingungan menentukan siapa sosok yang akan memimpin sidang. Mereka dihadapkan pada dilema bahwa kongres tersebut digagas oleh Perwani Yogyakarta, tetapi tidak ada posisi yang jelas tentang pusat dan daerah sehingga

mereka tidak bisa secara otomatis menjadi pemimpin. Setelah melalui perdebatan sengit, mereka pun sepakat mengangkat Soejatin Kartowijono sebagai pimpinan rapat. Pemilihan itu setidaknya dilakukan dengan dua pertimbangan. *Pertama*, Soejatin adalah peserta yang paling tua. *Kedua*, ia adalah sosok kunci di balik Kongres Perempuan Pertama 22-25 Desember 1928 (Blackburn (ed), 2007).



Gambar 1. Lokasi Kongres Pertama Perwari

Sumber: Panitia Pembangunan Monumen Perjuangan '45 Klaten, 1976:102

Tidak hanya merumuskan bentuk organisasi dengan tugas-tugas seperti mengucapkan salam dengan pekik merdeka, mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, serta membantu Komite Nasional Indonesia di daerah-daerah, kongres tersebut juga menjadi media perjumpaan sekaligus ajang bertukar pikiran bagi aktivis-aktivis perempuan di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Tokoh-tokoh pergerakan wanita yang telah lama tidak saling bertemu, pada kesempatan itu bisa berkumpul, tidur dalam satu bangsal berjejer seperti ikan pindang. Menyenangkan memang. Pada kongres tersebut, kami bisa berbincang-bincang dengan Ibu Burdah, Ibu Susanto Tirtoprodjo, Ibu Supeni, Ibu Sri Mangunsarkoro, dan tokoh-tokoh pergerakan wanita lainnya (Hardi, 1985: 40). Selain itu, kongres juga menghadirkan pengalaman perjumpaan perempuan di era kemerdekaan, menumbuhkan identitas baru sebagai perempuan Indonesia, serta menghasilkan beragam keputusan.

Dua peristiwa penting turut menandai hari terakhir kongres itu. Peristiwa pertama adalah perjumpaan intim para perempuan itu dengan presiden mereka di Stasiun Klaten. Pada petang hari usai kongres di bawah pimpinan Ibu Sri Mangoensarkoro kita peserta kongres berkumpul di stasiun Klaten, menunggu datangnya Presiden Soekarno dan beberapa pejabat tinggi negara dari Yogyakarta ke Madiun. Begitu KA—kereta api—berhenti di stasiun Klaten turunkan Bung Karno dan pengiringnya ini menerima laporan hasil kongres yang disampaikan oleh ibu Sri Mangoensarkoro.

Dengan rasa puas dan bangga Presiden memberikan restunya...Disertai lambaian tangan dan senyum khas Bung Karno dan pengiringnya kita lepaskan mereka....Peserta kongres pun dengan bangga dan penuh semangat pulang ke tempat masing-masing dengan membawa ide baru untuk membela tanah air tercinta (Soedijat, *op.cit*: 287).

Sementara peristiwa penting kedua adalah keputusan Perwani dan Wani berfusi menjadi satu organisasi baru perempuan Indonesia di era kemerdekaan. Keputusan itu paling memungkinkan bagi keduanya karena keberadaan mereka yang independen, berbeda dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya—seperti Wanita Taman Siswa, Aisjiah, serta Pemoeda Poetri Indonesia—yang memiliki organisasi induk. Mulanya fusi itu akan diberi nama Persatuan Wanita Indonesia (Perwindo) agar tampak seperti nama partai. Akan tetapi, supaya terdengar feminin, ada yang mengusulkan nama Perwari (Soewito, *op.cit*: 259). Selanjutnya, kedua organisasi itu sekaligus bersepakat memilih Sri Mangoensarkoro dan D.M. Hadiprabowo sebagai ketua dan wakilnya sedangkan Yogyakarta menjadi pusat pergerakannya (nn, tt: 277). Di Klaten pula, Perwani dan Wani bersepakat bahwa organisasi baru mereka, Perwari, didasarkan pada tiga asas, yaitu ketuhanan, kebangsaan, dan kerakyatan. Adapun tujuan utamanya adalah menuntut dan mempertahankan keadilan sosial demi terwujudnya keselamatan dan perikemanusiaan di dalam masyarakat Indonesia (*Madjallah Wanita Repoebliek Indonesia*, 1946:9). Selanjutnya, mereka juga memilih trisula yang berbentuk tiga keris berlekuk lima dalam satu lingkaran sebagai simbol organisasi Perwari.

Sri Mangoensarkoro, sang ketua, dalam media perdana Perwari menjelaskan bahwa trisula melambangkan kebenaran, kesucian, dan keberanian hidup, sementara lekuk lima dan lingkaran masing-masing melambangkan persatuan selayaknya cerita pewayangan Pandhawa lima yang memerangi angkara murka demi terciptanya kebulatan kesempurnaan—simbol ini disempurnakan sepuluh tahun kemudian menjadi simbol yang dikenal sekarang (*Suara Perwari* 1956:23).

Keberadaan Perwari sebagai hasil fusi Perwani dan Wani bukan hal mudah. Mangoensarkoro mencatat bahwa sesungguhnya kedua organisasi tersebut sebenarnya berbeda aliran secara ekstrem. Menurutnya, Wani adalah organisasi perempuan yang memiliki kesadaran kebangsaan perempuan merdeka sementara Perwani tidak lebih dari organisasi perempuan yang mewarisi tradisi Fujinkai dan dipimpin oleh orang-orang baru yang pada zaman Belanda belum pernah memegang kendali pergerakan wanita (Mangoenasrkoro, *op.cit*: 18).

Di satu sisi, perbedaan latar belakang antara Wani dan Perwani membuat Perwari tampil sebagai organisasi perempuan dengan paket lengkap. Mangoensarkoro berpendapat bahwa kehadiran Perwani untuk garis belakang peperangan sangat tepat sekali bagi keperluan pertahanan kemerdekaan di Indonesia. Di lain sisi, perbedaan itu juga membuat Perwari sangat rentan dan terancam tidak solid. Ancaman kerentanan itu semakin terbuka seiring kebijakan Perwari yang membebaskan anggota-anggotanya untuk memasuki organisasi-organisasi politik yang sesuai dengan asas dan tujuan Perwari, sekalipun mereka menyatakan diri sebagai organisasi sosial (*Ibid.*: 18-21).

Satu Biduk Dua Nahkoda

Sekalipun didirikan di atas pondasi yang berlainan jenis, sebagai organisasi “baru” perempuan di era kemerdekaan, Perwari mendapat perhatian yang relatif besar. *Kedaulatan Rakjat* (19-12-1945) memuat besar-besaran berita pembentukan organisasi ini di halaman pertamanya. Tidak hanya itu, surat kabar itu juga menampilkan urgensi program Perwari untuk membela kemerdekaan Indonesia. Antara lain: (1) mendorong pemerintah untuk menggunakan tenaga perempuan dalam upaya bela negara, (2) mendirikan atau membantu koperasi untuk keperluan

dapur umum dan membantu beban kaum ibu dalam rumah tangga, (3) memperluas dapur umum, (4) mengusahakan pakaian, (5) mengadakan tempat pemeliharaan anak supaya ibunya dapat bekerja untuk umum, (6) membantu pengungsian, serta (7) memikirkan dan menjalankan kebersihan umum untuk mencegah penyakit menular yang sedang berjangkit.



Gambar 2. Sri Mangoensarkoro. Sumber: Mangoensarkoro 1946:i

Selain itu, kepopuleran Perwari juga terlihat dari ragam kegiatan yang dilakukan anggotanya. Kurang dari seminggu sejak terbentuk, organisasi yang berpusat di Bintaran Kidul No. 28 (kediaman Pangeran Hadinegoro), Yogyakarta ini muncul sebagai sponsor utama peringatan Hari Ibu di Yogyakarta, 22 Desember 1945. Dalam acara tersebut sang ketua bersanding dengan Ki Hadjar Dewantara menyampaikan pidato tentang kaum perempuan dan perjuangan kemerdekaan (*Kedaulatan Rakjat*, 23-12-1945).

Kepopuleran Perwari juga terlihat dari keterlibatan perempuan-perempuan elite terkemuka dan populer. Baik sebagai pengurus maupun anggota biasa. Di antaranya Gusti Nurul, kembang pergerakan dari Mangkunegaran yang menjadi ketua bagian sosial Perwari cabang setempat (*Wanita*, 1950:229), Maria Ulfah Santosa, Soewarni Pringgodigdo, Moerdjani, S.K. Trimoerti, Mangoen Poespito, Soesilowati, serta Soeprapti. Bersama-sama, para perempuan ini mengusahakan berbagai kebutuhan logistik untuk front Republik Indonesia. Mulai dari *nuk* (nasi bungkus), jadah, serundeng, ikan asin, serta aneka makanan kering lainnya. Di samping itu, mereka membentuk badan pekerja yang bertugas mempersiapkan kongres bagi organisasi-organisasi perempuan di Indonesia.

Kebesaran Perwari itu sekaligus menjadi daya pikat organisasi-organisasi perempuan lainnya, yang umumnya merupakan sayap organisasi keagamaan maupun partai politik, juga menginduk kepada Perwari. Salah satunya adalah Nahdlatol Oelama Moeslimat yang berpendapat bahwa

Perwari adalah organisasi perempuan independen yang membantu organisasi-organisasi perempuan lainnya dalam memperluas pergaulan (Soewito, *op.cit.*: 217).

Di bawah pengaruh Sri Mangunsarkoro, perempuan-perempuan kelompok ini melengkapi konsep ibu bangsa menjadi ibu negara. Dalam konteks inilah, revolusi menjadi jalan untuk mencapai masyarakat sosialis berdasarkan perikemanusiaan yang bertuhan. Mereka berkeyakinan bahwa menjadi ibu negara adalah mempertahankan hak dan kedudukan perempuan kemanusiaan perempuan, bukan partai politik, sesuai dengan isi Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia (Mangoensarkoro, *op.cit.*: 28-31).

Menyimak urgensi program Perwari serta aktivitasnya selama dua minggu pertama, terlihat jelas bahwa organisasi ini beroorientasi pada dua hal. *Pertama*, usaha bela negara perempuan dengan menitikberatkan perjuangan di garis belakang pertempuran. *Kedua*, pemberdayaan perempuan dan keluarga untuk mendukung upaya bela negara di masa perang. Orientasi tersebut semakin pelik ketika di awal Januari 1946 Perwari memutuskan untuk bergabung dengan Persatoean Perdjoengan.



Gambar 3. Berita pertama Perwari

Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 19-12-1945

Persatoean Perdjoengan merupakan organisasi massa yang terbentuk dari hasil kongres 132 organisasi sipil, partai, laskar, tentara di Gedung Serbaguna Purwokerto, 3-5 Januari 1946. Adapun nama Persatoean Perdjoengan baru digunakan dua minggu kemudian dalam Kongres kedua 15-16 Januari 1946 di Gedung Agung Solo. Sekalipun baru sepuluh hari terbentuk, keanggotaan Persatoean Perdjoengan terus bertambah. Salah satunya adalah Perwari. Bersama dengan 140 organisasi lainnya, Perwari menyepakati dan menuntut tujuh butir minimum program Persatoean Perdjoengan, yaitu: (1) berunding atas kemerdekaan 100%, (2) pemerintahan rakyat (dalam arti kesesuaian haluan pemerintah dengan kemauan rakyat), (3) tentara rakyat (dalam arti kesesuaian haluan tentara dengan kemauan rakyat), (4) melucuti senjata Jepang, (5) mengurus tawanan bangsa Eropa, (6) menyita dan memanfaatkan pertanian

musuh, serta (7) menyita dan memanfaatkan perindustrian musuh (pabrik, bengkel, tambang, dan lain-lain). Tidak hanya itu, Perwari juga termasuk perwakilan Persatoean Perdjoengan yang membawa tujuh butir program minimum itu kepada pemerintah, sekalipun ditolak. Pemerintah berpendapat bahwa tuntutan itu terlalu radikal.

Gagal berunding tidak menyurutkan langkah Persatoean Perdjoengan dan organisasi-organisasi pendukungnya. Gelombang demonstrasi dan tuntutan program lainnya terus disuarakan. Salah satunya pada tanggal 17 Februari 1946, Persatoean Perdjoengan melayangkan lima tuntutan, yaitu: (1) isi minimum program Persatoean Perdjoengan, (2) penarikan tentara Inggris-NICA dari Indonesia, (3) lenyapnya pengadilan dan polisi internasional dari Indonesia, (4) kembalinya pemuda dan gadis-gadis yang ditawan Inggris-NICA, serta (5) membatalkan perundingan dengan van Mook sebelum syarat pengakuan Indonesia merdeka tercapai. Tidak ketinggalan, langkah ini juga diikuti dengan larangan bagi anggota Persatoean Perdjoengan untuk duduk dalam pemerintahan kabinet Soetan Sjahrir.

Bagi Perwari, koalisi dengan Persatoean Perdjoengan itu semata-mata tuntutan zaman. Mereka berpendapat bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan bagi perempuan hanya bisa dicapai melalui jalur politik dan langkah-langkah konkret, bukan melalui cara-cara diplomasi sebagaimana dilakukan pemerintah.

Datangnja tentera Inggris sebagai wakil Sekutu meniupkan...tragedie2 revolusi....Gelombang politik jang menderu2...tak urung berpengaruh terhadap organisasi2 wanita...untuk mempertahankan agar dilaksanakannya politik proklamasi agar dibentuk Persatoean ...Adapoen organisasi wanita jang mendjadi anggauta dari Persatoean dikala itu ialah Perwari...satu organisasi wanita terbesar jang lahir ditengah2 revolusi, jang memang selajaknya djika ikut bertanggungjawab terhadap terlaksananya politik proklamasi dan revolusi itu (Soeprati. 1953: 49).

Tidak hanya bergabung dengan Persatoean Perdjoengan, Perwari juga mengajak organisasi-organisasi lainnya untuk mengikuti jejaknya. Ajakan ini disampaikan secara lugas oleh wakil-wakil Perwari dihadapan tiga organisasi lainnya, PPI, Wanita Kristen Indonesia (WKI), serta Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) bagian wanita dalam Konperensi Wanita Indonesia, 25-26 Februari 1946 di Solo—Aisjijah, Moeslimat, dan Istri Sedar juga diundang tetapi tidak hadir. Sekali lagi, dalam pandangan Perwari, diplomasi hanya merugikan saja. Sebab, peristiwa di Surabaya, Semarang, Magelang, Bandung, dan Jakarta telah membuktikannya. Selain itu, rakyat juga percaya bahwa Belanda mempunyai maksud lain untuk menjajah kembali Indonesia (*Verslag Konperensi Wanita Indonesia*).

Perbedaan Imajinasi

Ajakan Perwari supaya (organisasi) perempuan bergabung dengan Persatoean Perdjoengan mendapat bermacam-macam tanggapan. WKI dan PKRI menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap. Sementara PPI, sekalipun para wakilnya tidak hadir karena diharuskan kembali ke Yogyakarta, menyampaikan bahwa mereka mendukung kemerdekaan Indonesia 100% sebagaimana semboyan Persatoean Perdjoengan.

Di lain sisi, perbedaan pendapat tentang Persatoean Perdjoengan juga terjadi di dalam tubuh Perwari. Soewarni Pringgodigdo perwakilan Perwari Jakarta, misalnya, menyatakan setuju selama hal itu tidak merobohkan pemerintah dan di antara mereka saling mengerti juga mempercayai. Sikap ini mendapat tanggapan keras dari Sri Mangoensarkoro. Di hadapan Kongres, perempuan yang dibesarkan dalam tradisi Taman Siswa ini menyatakan dengan tegas bahwa Persatoean Perdjoengan tidak bermaksud menggulingkan pemerintah melainkan melakukan koordinasi dalam perjuangan sehingga perempuan pun harus terlibat.

Keputusan Perwari untuk memengaruhi organisasi perempuan mengikuti kiprahnya dalam Persatoean Perdjoengan berbuntut panjang. Sesuai kongres, anggota-anggota yang tidak setuju dengan kebijakan Sri Mangoensarkoro terus melayangkan protes. *Pertama*, Persatoean Perdjoengan adalah badan politik sedangkan Perwari bukan suatu pergerakan politik. *Kedua*, apakah Perwari juga akan melucuti tentara Jepang serta menyita perkebunan dan perusahaan, seperti yang tertera dalam program jangka pendek Persatoean Perdjoengan? *Ketiga*, Perwari telah melanggar asas dan anggaran dasarnya sendiri (*Ibid.*). Selain itu, kekisruhan juga ditunjukkan dari pernyataan Maria Ulfah Santoso satu bulan setelah Kongres di Solo. Menteri Sosial dalam kabinet Sjahrir itu mengatakan bahwa ia telah menarik diri dari Perwari karena berpendapat bahwa organisasi itu telah melanggar anggaran dasarnya. Selain itu, ia juga menegaskan keputusan itu bahkan diambilnya jauh sebelum ia dilantik sebagai menteri (Poeze, *op.cit.*: 21).

Pernyataan Maria Ulfah tersebut sangat menarik jika disandingkan dengan laporan Kongres di Solo 25-26 Februari 1946. Ketidakhadiran Maria Ulfah dalam Kongres tersebut, yang hanya dilaporkan “tidak dapat hadir” tanpa ada keterangan sebagaimana ketidakhadiran pemuka utama lainnya, sepertinya sudah menjadi tanda-tanda bahwa ia mulai meninggalkan Perwari. Meskipun demikian, keputusan itu tampaknya belum ditunjukkannya secara terang-terangan (*Verslag Konperensi Wanita Indonesia, 1946*).⁴ Tidak ketinggalan, ia juga menyusun daftar perempuan progresif dari Perwari antara lain dirinya sendiri, Ny. Gondosoebroto, Ny. Soewarni Pringgodigdo, Ny. Sri Mangoensarkoro, Ny. Moerdjani, M. Moedinem, Ny. Koesbani, Ny. S.K. Trimoerti, N. Sosilawati, serta Ny. Soepardjo (*Ibid.*).

Keputusan Maria Ulfah diikuti oleh perempuan-perempuan lainnya terutama setelah Persatoean Perdjoengan menggalang aksi pemboikotan terhadap kabinet Sjahrir. Perselisihan, bentrokan, dan perpecahan berlangsung sengit dalam tubuh Perwari. Namun, Sri Mangoensarkoro menyikapinya dengan sangat tenang. Ia menulis bahwa segala gejolak yang terjadi dalam Perwari adalah sebuah dinamika yang wajar. Lebih dari itu, dinamika tersebut dipercayainya justru sebagai dorongan untuk kaum perempuan dalam perjuangan politik yang mengelilinginya kemudian harus mampu menetapkan kakinya dalam susunan negara merdeka.

Pecah Menjadi Dua

Sri Mangoensarkoro optimis dengan pendiriannya. Akan tetapi, ancaman-ancaman akan keluar semakin santer disuarakan cabang-cabang Perwari. Tanggal 5 April, misalnya, Perwari Jawa Timur mengancam akan keluar jika Perwari tetap mendukung Persatoean Perdjoengan. Langkah ini diikuti oleh Perwari Priangan sehari kemudian (Poeze, *loc.cit.*). Lima hari setelahnya, 11 April 1946, Mangoensarkoro mengambil langkah cepat menyatakan pembelaannya untuk meredam protes-protes sekaligus mencegah semakin banyaknya cabang maupun anggota yang keluar.

Pembelaan itu dimuat dalam *Madjallah Wanita Repoeblik Indonesia*. Di sana ia menjawab bahwa keanggotaan Perwari dalam Persatoean Perdjoengan dan dan sama sekali tidak melanggar asas dan anggaran dasar. *Pertama*, Pancasila masih menjadi asas utama Perwari untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia 100%. *Kedua*, Perwari berpendapat bahwa ada banyak jalan untuk mewujudkannya, termasuk koalisi dengan Persatoean Perdjoengan.

Persatoean Perdjoengan adalah soeatoe badan politik....Diantaranya mengenai 100% Indonesia merdeka dan Perwari adalah pergerakan sosial...sosial dan politik tidak dapat dipisahkan. Doea-doeanja saling mempengaruhi...dan Perwari sebagai satoe

⁴ Halaman keempat laporan kongres masih menyebutkan bahwa ia masih memberikan daftar nama-nama perempuan yang dipandang benar-benar mewakili gerakan perempuan. Di antaranya perempuan-perempuan dari PPI seperti Ny. Soebandrio, Ny. Soetarmen, Ny. S.K. Trimoerti, N. Soesilawati, serta dirinya sendiri.

pergerakan wanita Jang bertoejoean dan bertjita-tjita tentoenja djoega menghendaki kemerdekaan Indonesia 100%. Oentoek sampai ke arah tjita-tjita terseboet, bolehlah orang memakai alat ataoe djalan apa anggaran dasarnja...salah satoe djalan itoe dari kehakiman Perwari, jalah masoek dalam Persatoean.

Selanjutnya, ia menyatakan dengan tegas bahwa anggota-anggota yang mempertanyakan dan memprotes kebijakannya tidak lebih dari kumpulan orang-orang bimbang. Sementara protes-protes mereka juga dirasa sangat lemah dan tidak tepat. Pasaunya, menurut Mangoensarkoro, setiap orang, khususnya perempuan, memiliki hak yang sama untuk mengkritisi pemerintah. Selama caranya baik dan tujuannya untuk memperbaiki, tidak ada alasan untuk takut berpolitik seperti berkoalisi dengan Persatoean Perdjoengan yang dilakukan oleh Perwari.

Karena bagi soeatoe negeri jang berasaskan demokrasi seperti Indonesia ini, adalah telah menjadi haknya ra'jat oentoek ikoet tjampoer mengoroos negara, baik laki-laki ataoe peremporan. Djoega hak memberi correctie kepada beleid pemerintah, asalkan semoea itoe berjalan dengan tjara jang sehat dan bermaksoed memperbaiki. Karenanya ta' seharoesnja orang takoet berpolitik (Mangoensarkoro, *op.cit*: 14).

Sekalipun telah berupaya melakukan pembelaan dan memberi kesadaran bahwa politik tidak selalu buruk bagi perempuan, beragam perdebatan tersebut memaksa Perwari melakukan kongres darurat 15-17 Mei 1946. Adapun agenda utama kongres tersebut ialah meninjau kembali keadaan Perwari, baik terkait dengan hubungan internal maupun eksternal. Mangoensarkoro melukiskan bahwa kongres tersebut berlangsung sangat panas. Pertentangan dua aliran yang mengiringi sejarah Perwari semakin tidak terelakkan (*Ibid.*: 24) dan berakhir dengan penolakan terhadap kepemimpinan dan kebijakannya (Hardi, *op.cit*: 41).

Selain itu, kongres tersebut juga menghasilkan dua keputusan penting lainnya. *Pertama*, pimpinan pusat Perwari dipindahkan dari Yogyakarta ke Malang, Jawa Timur, untuk menjauhkan pengaruh politik dalam organisasi, khususnya afiliasi dengan Persatoean Perdjoengan. *Kedua*, Ny. Soekardjo Wirjopranoto dipilih sebagai ketua baru sementara arah dan kegiatan Perwari difokuskan pada perbaikan internal (Kartowijono dan Sujud, 1969). Perpindahan dan pemusatan fokus itu juga dipandang Sri Mangoensarkoro sebagai kemenangan perempuan-perempuan konservatif yang semata-mata hanya melanjutkan tradisi Jepang (Mangoensarkoro, *op.cit*: 51).

Keputusan penyelamatan Perwari dari pengaruh politik, khususnya Persatoean Perdjoengan, menyulut berbagai masalah. Mangoensarkoro yang berpikiran bahwa perempuan harus turut campur dalam politik untuk memajukan negara yang baru terbentuk akhirnya memutuskan keluar dari Perwari. Langkah ini diikuti oleh anggota-anggota lainnya dari berbagai cabang. Bahkan, wakil Perwari, M.D. Hadiprabowo pun turut dalam biduk ini. Bersama-sama dengan 3.050 anggota, mereka membentuk organisasi baru demi mewujudkan gagasan ibu negara. Organisasi ini bernama Partai Wanita Rakjat pada 22 September 1946 dan berkedudukan di Notowinatan No. 60, Yogyakarta (nn, 1958).

Henggangnya tokoh-tokoh sentral Perwari menimbulkan perbincangan ramai. Trimoerti bahkan menulis tiga artikel berturut-turut dalam surat kabar *Kedaulatan Rakjat* (29-8-1946, 30-8-1946, 2-9-1946). Di sisi lain, artikel itu ditanggapi sebagai penghiburan bagi biduk yang telah terpisah dari induknya itu,

Artikel seri Nj. S.K. Trimoerti jang streng politisch ini menimbulkan tergeraknja djiwa merdeka dari wanita-wanita jang yakin bahwa wanita berhak memperdjoangkan soal kewanitaannya dengan melaloei djalan apa sadja, djoega djalan politik, karena kewanitaan adalah kenjataan jang koeat, haloes, dan tinggi dan sama-sama sangat

diboetoehkan oleh bentoekan Negara, seperti ekonomi dan lain-lain (Mangoensarkoro, *op.cit.*: 24).

Sementara itu, Poeze menulis bahwa Mangoensarkoro itu cukup emosional dengan keputusan tersebut. Keteguhannya itu mengubah dari seorang kritikus menjadi murid Tan Malaka. Selanjutnya, ia juga terus menyebarkan ide-ide politik kewanitaan dan membesarkan partai wanita bersama dengan M.D. Hadiprabowo dan S.K. Trimoerti. Belajar dari kegagalannya bersama Perwari pula, Mangoensarkoro menerapkan disiplin dengan melarang keanggotaan rangkap bagi para anggotanya (Poeze, *op.cit.*: 362). Dengan kata lain, ia sekaligus mencetak perempuan-perempuan militan untuk perjuangan revolusi.

Sementara itu, keputusan Perwari untuk berkonsentrasi pada perbaikan internal organisasi serta menjauhi dunia politik membuat organisasi ini mengalami kemunduran. Perwari relatif kurang terdengar lagi kecuali dalam hal pengiriman bahan makanan kering ke front pertempuran. Selanjutnya, organisasi ini populer kembali pada 1950-an dengan rancangan undang-undang perkawinan, konfrontasi dengan Sukarno, rontok kembali menjelang pemilu 1955, bangkit lagi, lalu kembali tergempur badai politik 1965. Lebih lanjut, dari fase yang jatuh bangun yang menjadi bagian narasi tentang Perwari tersebut, sikap Perwari terhadap politik menjadi salah satu kajian menarik. Pengalaman Perwari selama lima bulan pertamanya relatif tidak pernah disinggung dalam sejarah Perwari. Sementara itu, bundel arsip tentang sikap politik Perwari setelah periode revolusi selalu menggarisbawahi bawah Perwari sebagai organisasi nonpolitik (Jusupadi, 1951; Jusupadi, 1953; Perwari, 1951; *Suara Perwari* 1951; Sutarman, 1951; *Suara Perwari* Juni 1951; M. Andreas Sastrohusodo, 1953. *Suara Perwari* Juni 1953; Hadidjah L, 1953; *Suara Perwari*, 1953; M. Andreas, M. Sastrohusodo, 1956; *Suara Perwari* Oktober 1956; Pusat Pimpinan Perwari, 1957. *Suara Perwari* Maret 1957; Pusat Pimpinan Perwari, 1957; *Suara Perwari* April 1957; Pusat Pimpinan Perwari, 1957; *Suara Perwari* 1957). Hal ini diperkuat dengan perubahan anggaran dasar Perwari yang melarang semua anggota Perwari untuk berpolitik apalagi menjadi anggota suatu partai politik.⁵ Di lain sisi, “penyembunyian” sejarah lima bulan awal gerak Perwari membangun kesan organisasi ini sebagai organisasi perempuan yang bergerak semata-mata di ranah sosial. Di masa revolusi hal ini diekspresikan dengan partisipasi atau penyokong laki-laki dalam mempertahankan kemerdekaan (Tambunan, 1951; *Suara Perwari* Desember 1951; Sutarman, 1951; *Suara Perwari* Desember 1952).

Penutup

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan memberikan identitas dan transformasi baru kepada perempuan Indonesia. Kedua proses ini melahirkan perbedaan imajinasi dan pemaknaan terhadap keindonesiaan, proklamasi kemerdekaan, revolusi Indonesia, dan posisi perempuan dalam proses tersebut. Perbedaan ini terutama terlihat dalam pembentukan organisasi fusi perempuan yang akhirnya disepakati bernama Perwari.

Pengalaman dua rezim sebelumnya turut mempengaruhi imajinasi dan transformasi perempuan-perempuan aktivis dalam organisasi Perwari. Aktivis perempuan di akhir rezim kolonial Belanda mengimajinasikan proklamasi kemerdekaan sebagai tonggak transformasi konsep ibu bangsa menjadi ibu negara. Dalam konteks inilah, revolusi adalah jalan untuk mempertahankan hak dan kedudukan perempuan kemanusiaan perempuan sesuai dengan isi Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan aktivis perempuan rezim Jepang. Mobilisasi perempuan berdasarkan konsep istri yang baik dan ibu yang bijaksana

⁵ Bandingkan Anggaran Dasar Perwari pada Keputusan II Kongres 14 Februari 1946 pasal 5 (1) dengan Anggaran Dasar 1971 pasal I tentang disiplin anggota.

(*Ryosai Kenbo*) membentuk imajinasi bahwa peran perempuan dalam revolusi Indonesia adalah pendukung garis belakang dan menolak politik. Dalam konteks ini maka perpecahan Perwari bukan semata-mata pelanggaran anggaran dasar maupun afiliasi Perwari dengan Persatuan Perjuangan yang kemudian ditetapkan sebagai organisasi terlarang.

Pada akhirnya, kajian lima bulan Perwari kiranya dapat memberikan empat hal. Pertama, narasi alternatif Perwari sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Kedua, melacak dasar pernyataan sikap Perwari untuk tidak terlibat dalam politik. Ketiga, memperkuat posisi perempuan dalam proses pembentukan konsensus kenegaraan dan hakikat keindonesiaan. Keempat, mengkritisi perlunya tinjauan ulang epistemologi periodisasi sejarah Indonesia khususnya gerakan perempuannya. Sehubungan dengan hal ini, periode revolusi sepanjang 1945-1949 kiranya bukanlah periode tunggal. Sementara lima bulan pertama Perwari yang penuh dengan gejolak kiranya menjadi satu periode tersendiri dalam periode revolusi. Dengan demikian, penelitian lanjutan dibutuhkan untuk penyusunan periodisasi sejarah perempuan, khususnya selama empat tahun krusial ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kedaulatan Rakjat, 19-12-1945
 Kedaulatan Rakjat, 23-12-1945
 Kedaulatan Rakjat, 28-11-1945
 Kedaulatan Rakjat, 29-8-1946
 Kedaulatan Rakjat, 30-8-1946
 Kedaulatan Rakjat, 2-9-1946
Madjallah Wanita Repoeblik Indonesia, 01-05-1946
Verslag Konperensi Wanita Indonesia 25-26 Februari 1946
 Anonim. 1958. *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*.
 Anonim. "Riwayat Singkat Dari Perwari." *Stensilan*.
 Anwar, Rosihan. 2015. *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Jilid 7: Kisah-kisah Zaman Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Kompas.
 Astuti, Sri Retna. 2006. "Ibu Ruswo, Pejuang Wanita dan Ibu Prajurit." *Jantra* Vol. 1, No. 2, Desember 2006. Yogyakarta: Balai Pelestarian dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
 Blackburn, Susan (ed). 2007. *Kongres Perempuan Pertama*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Jakarta.
 Blackburn, Susan. 2009. *Woman and the State in Indonesia*. Jakarta: Kalyanamitra.
 Darwin, Muhajir. 2004. "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa Ke Masa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 7. No. 3. Maret 2004.
 Department of Information Republic of Indonesia. 1968. *The Indonesian Women's Movement A Chronological Survey of the Women's Movement in Indonesia*. Jakarta: Department of Information Republic of Indonesia.
 Dobbin, Christine. 1979. "The Search Women in Indonesia History," dalam Alisa Thomson Zainuddin (ed), "Kartini Centenary Indonesian Women Then and Now," *Annual Indonesian Lecture Series* No. 12.
 Doran, Christine. 1987. *The Indonesian Women's Movement*. Queensland: James Cook University.
 Fatimah, Siti. 2008. "Perspektif Jender dalam historiografi Indonesia: Pentingnya Penulisan Sejarah Androginis," dalam Djoko Marihandono(ed), *Titik Balik Historiografi Indonesia*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerjasama dengan Departemen Sejarah UI.
 Fatmawati, Devi. 2019. "Peranan Sujatin Kartowijono dalam Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) Tahun 1945-1960." Skripsi. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
 Hardi, Lasmidjah. 1985. *Sumbangsihku Bagi Pertiwi: Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran Jilid V*. Jakarta: Sinar Harapan.
 Jusupadi, B. 1951. "Perwari dengan Politik." *Suara Perwari* Maret 1951.
 Jusupadi, B. 1953. "Pemandangan Terhadap Keputusan Kongres: Perwari dengan Politik." *Suara Perwari* April 1953.
 Kartowijono, Soejatin. 1984. "Kebangkitan gerakan Perempuan Indonesia." *Stensilan*. Koleksi Perpustakaan Soejatin.
 Kartowijono, S. dan T. Sujud. 1969. "Riwayat Perjuangan Perwari." *Stensilan*. Jakarta: Pimpinan Pusat Perwari.
 Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
 Kongres Wanita Indonesia. 1978. *Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
 Kowani. 2019. "Perwari." Diakses 19 Juni 2020 (<https://kowani.or.id/perwari>).

- Mangoensarkoro, Sri. 1946. *Pergerakan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: Wanita Rakjat.
- Muryantoro, Hisbaron. 2006. "Pemberontakan Rakyat Indonesia Putri 1945-1948." *Jantra* Vol. I, No. 2, Desember 2006. Yogyakarta: Balai Pelestarian dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Nimat, Magdalena. 2009. "Gerakan Perempuan di Indonesia 1950-1965: Studi Kasus Gerwani." *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Nugroho, Arifin Suyo. 2008. "Biografi Siti Suhartini: Pendamping Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno (1924-1970)." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ohorella, G.A., Sri Sutjainingsih, Mochtaruddin Ibrahim. 1992. *Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Panitya Pembangunan Monumen Perjuangan '45 Klaten. 1976. *Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Klaten*. Klaten: Panitia Pembangunan Monumen Perjuangan '45 Klaten.
- Perwari. 1951. "Sikap Perwari terhadap Peraturan Pemerintah No. 39." *Suara Perwari* 1951.
- Poeze, Harry A. 2009. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 2: Maret 1946-Maret 1947*. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Purwanto, Bambang. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!* Yogyakarta: Ombak.
- Pusat Pimpinan Perwari. 1957. "Pra-Advies tentang Pentjalonan D.P.R.D." *Suara Perwari* Maret 1957.
- Pusat Pimpinan Perwari. 1957. "Djalan Keluar dari Kesulitan Sekarang!" *Suara Perwari* April 1957.
- Pusat Pimpinan Perwari. 1957. "Pernyataan 15 Organisasi-organisasi Wanita." *Suara Perwari* 1957.
- Rambe, Hanna. 1983. *Mencari Makna Hidupku: Bunga Rampai Perjalanan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Rohmah, Ainur. 2015. "Dinamika Perwari Diy Tahun 1946-1998." *Skripsi*. Universitas Airlangga.
- Rospirawati, Ai. 2013. *Peranan Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) Pada Masa Revolusi Fisik di Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Santosa, Maria Ulfah. "Sambutan Nj. Mr. Maria Ulfah Santosa pada hari ulang tahun ke-10 Perwari." *Suara Perwari* Februari 1956. hlm. 6.
- Sasi, Galuh Ambar. 2010. "Gerakan Perempuan Indonesia dalam Konstelasi Politik 1950-an: Studi Perwari." Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sasi, Galuh Ambar. 2015. "Gelora Api (Ke)Merdeka(An) Di Jawa Tengah." Dalam, Jajat Burhanuddin dan Amurwani Dwi Lestariningsih (ed). *Sejarah Berita Proklamasi Di Indonesia* Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sasi, Galuh Ambar. 2017. "Di Tanah Kiblik: Perempuan Dalam Ge(Mer)Lap Revolusi," dalam Sri Margana et al, *Gelora Di Tanah Raja: Yogyakarta Pada Masa Revolusi 1945-1949*, Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada.
- Sastrohusodo, M. Andreas. 1953. "Perwakilan Perwari dalam D.P.R.D." *Suara Perwari* Juni 1953.
- Sastrohusodo, M. Andreas. 1956. "Tentang D.P.R.D." *Suara Perwari* Oktober 1956.
- Soedijat, Soeratmi Iman. 1995. *50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta: Sebuah Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Panitia Gabungan Pemerintahan HUT Ke-50 Kemerdekaan RI Bhakti Pertiwi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Soekanto, Hadidjah L. 1953. "Maukah Wanita Duduk dalam Constituante dan/atau Parlemen?" *Suara Perwari* 1953.
- Soeprapti, I.N. 1953. "Selayang Pandang Gerakan Wanita Indonesia," *Madjallah Doenia Wanita*, 1953.

- Soewito, H.N. Hadi (ed). 2005. *Wanita Pejuang*. Jakarta: Paguyuban Wanita Pejuang.
- Soewito, H.N. Hadi. 1992. *Lahirnya Kelasykaran Wanita dalam Wirawati Catur Panca*. Jakarta: Yayasan Wirawati Catur Panca.
- Soewondo, Nani&N. Surasno. 1995. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Djakarta: Timun Mas.
- Stuers, Cora Vreede de. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Suhatno. 2006. "Sumbangan Kaum Wanita Yogyakarta Pada Masa Revolusi." *Jantra* Vol. I, No. 2, Desember 2006. Yogyakarta: Balai Pelestarian dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Sukarno. 1984. *Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia*. Jakarta: Idayu Press.
- Suryochondro, Sukanti. 1984. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: Rajawa
- Sutarman, S. 1951. "Perwakilan Perwari dalam D.P.R.2." *Suara Perwari* Juni 1951.
- Sutarman, S. 1951. "Perwari 7 Tahun: 17 Desember 1945-17 Desember 1952." *Suara Perwari* Desember 1952.
- Tambunan, M. Delima. 1951. "Menghadapi Peringatan 6 Th. Berdirinja Perwari Seluruh Indonesia." *Suara Perwari* Desember 1951.
- Taylor, Jean Gelman. 1995. "Image of Indonesia Revolution," dalam Jane Drakard dan John Legge, "Indonesian Independence Fifty Years on 1945-1995," *Annual Indonesia Lecture Series* No. 20.
- Trimurti, S.K. 1995. "Sejarah Pergerakan Wanita Indonesia." *Stensilan*. Koleksi Perpustakaan Soejatin.
- Triwibowo, D. 2006. "Gerakan Perempuan di Indonesia," *Basis* No 01-02, Tahun ke-55, Januari-Februari 2006.
- Utami, Alpi Fitri. 2002. "Konco Wingking: Studi Pemahaman Perempuan Jawa di Kalangan Anggota Persatuan Wanita Republik Indonesia Kota Yogyakarta." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wieringa, Saskia. 1998. *Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*. Jakarta: Kalyanamitra Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan.
- Winarni, V. Agus Sulistyono, Yustina Hastrini Nurwanti. 2013. *Dapur Umum Masa Perang Kemerdekaan II di Yogyakarta*. Yogyakarta: Museum Benteng Vredeborg.